

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
BIODATA	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAKSI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian	24
F. Kerangka Skripsi	27
BAB II TEORI NEGARA KESATUAN DAN HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH	
A. Negara Kesatuan Yang Di Desentralisasikan	29
B. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	33
B.1. Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	34
B.2. Teori Lahirnya Kewenangan Pemerintah Daerah	39
B.3. Bentuk Pengendalian Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah	42
B.4. Penyerahan Wewenang Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah	44
B.5. Paradigma Baru Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	45
B.6. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	47
C. Daerah Istimewa Dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	49
D. Pengisian Kepala Daerah	51
E. Pemilihan dan Penetapan Kepala Daerah	56
F. Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta	59
G. Kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	64
BAB III ANALISIS PENETAPAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MENURUT UU No.13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	
A. Mekanisme Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Undang – Undang No.13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta	75

B. Identifikasi Adanya Unsur Diskriminatif Dalam Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Menurut Undang – Undang No.13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta	83
B.1 Segi Historis	85
B.2 Segi Yuridis	88
C. Diskriminasi Perempuan Dalam Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta	97

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	101
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

